

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI PARKIR

Oleh

OMANT ASH SADIQI LA SIDA

Permasalahan parkir liar yang marak di wilayah DKI Jakarta menyebabkan rendahnya pemungutan retribusi parkir yang berdampak pada minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar guna meningkatkan PAD dari retribusi parkir serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar guna meningkatkan PAD, dan (2) bagaimana implikasi kebijakan penertiban parkir liar terhadap pendapatan daerah dari retribusi parkir.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara kepada informan dari Dinas Perhubungan dan masyarakat DKI Jakarta, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan penertiban parkir liar dengan melakukan penertiban yang berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum yang Dikelola Pemerintah dengan cara pendekatan persuasif dan humanis, termasuk pembinaan juru parkir liar, sosialisasi fasilitas parkir resmi, serta tindakan hukum bagi pelanggar. Implikasi kebijakan tersebut menimbulkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi sehingga pendapatan dari retribusi parkir mengalami kenaikan dan berdampak positif terhadap PAD. Kesimpulannya, penertiban parkir liar yang terencana dan harmonis mampu meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di DKI Jakarta.

Kata Kunci : Parkir Liar, Penertiban, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE POLICY OF THE DKI JAKARTA GOVERNMENT IN REGULATING ILLEGAL PARKING TO INCREASE REGIONAL REVENUE FROM PARKING RETRIBUTIONS

By

OMANT ASH SADIQI LA SIDA

The problem of illegal parking which is widespread in the DKI Jakarta area has resulted in low parking levy collection which has an impact on the minimal contribution of Regional Original Income (PAD). This research aims to examine the DKI Jakarta Government's policy in controlling illegal parking in order to increase PAD from parking fees and the implications of this policy for increasing regional income. Based on this, the problem formulation in this research is: (1) what is the DKI Jakarta Government's policy in controlling illegal parking in order to increase PAD, and (2) what are the implications of the policy on controlling illegal parking on regional income from parking fees.

The research method used is an empirical juridical approach by collecting data through literature study, interviews with informants from the Department of Transportation and the DKI Jakarta community, then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research show that the DKI Jakarta Government has implemented a policy to control illegal parking by carrying out control based on Governor Regulation Number 188 of 2016 concerning Public Parking Areas Managed by the Government concerning parking using a persuasive and humanist approach, including coaching illegal parking attendants, socializing official parking facilities, as well as taking legal action against violators. The implications of this policy have led to increased public awareness of using official parking facilities so that income from parking fees has increased and has a positive impact on PAD. In conclusion, a planned and harmonious control over illegal parking can increase the optimization of regional income from the parking fee sector in DKI Jakarta.

Keywords : Illegal Parking, Enforcement, Parking Retribution, Regional Original Revenue.